

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Krisis pengungsi yang diakibatkan tidak stabilnya situasi politik di Suriah mengakibatkan banyaknya laju pengungsi masuk ke Eropa. Hal ini merupakan krisis terburuk kedua setelah paska perang dunia kedua terjadi. Krisis ini mendapat berbagai respon dari negara-negara di Eropa. Ada yang merespon positif seperti Jerman dan ada juga yang merespon negative seperti Polandia. Polandia sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa pada awalnya merupakan negara yang menolak pengungsi untuk masuk ke negaranya yang sudah di jelaskan dalam Bab II mengenai sejarah Polandia. Polandia baru menerima pengungsi setelah menandatangani perjanjian internasional tentang pengungsi pada tahun 1990-an. Yang kemudian kembali menolak pada saat krisis pengungsi yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Yang dibuktikan pada Bab III dan Bab IV terkait alasan Polandia menolak pengungsi dari Timur Tengah pada tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyetujui 3 hipotesis yang telah dipaparkan sebelumnya diantaranya yaitu:

1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa Polandia menolak pengungsi dari Timur Tengah masuk ke negaranya pada tahun 2015 karena adanya factor politik domestic. Dimana di dalam factor politik domestic adanya pergantian kekuasaan partai yang ada di Polandia yaitu, partai Law and Justice dengan Presiden Andrej Duda. Partai ini merupakan partai yang memiliki ideologi kanan dan disebut partai populis nasional konservatif, euroskeptis yang mana sangat menentang untuk pengungsi masuk ke dalam negaranya serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.

2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa factor ekonomi juga mempengaruhi keputusan Polandia dalam menanggapi krisis pengungsi ini. Hal ini dilihat dari banyaknya laju imigran yang berasal dari Ukraina yang ingin bekerja di Polandia sehingga pemerintah menolak untuk menambah pengungsi masuk ke Polandia. Tidak hanya itu saja pandangan negative terhadap pengungsi yang hanya ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga nantinya berdampak dalam penambahan beban perekonomian Polandia.
3. Hipotesis ketiga menyatakan adanya factor internasional yang mempengaruhi pemerintah Polandia dalam menolak pengungsi dari Timur Tengah pada tahun 2015. Dalam konteks ini dibagi menjadi dua hal yaitu, pengaruh islamophobia dan kebijakan Uni Eropa. Islamophobia yang berkembang di Kawasan Eropa juga mempengaruhi Polandia dalam merespon isu pengungsi ini. Dimana, munculnya sentiment anti-Muslim yang berkembang di masyarakat dan elit pemerintah Polandia. Takutnya masyarakat akan hilangnya nilai-nilai kristen jika pengungsi masuk ke negaranya sehingga demi melindungi nilai-nilai kristen pemerintah menolak untuk menerima pengungsi dari Timur Tengah namun tidak menutup kemungkinan untuk menerima pengungsi dengan keyakinan agama yang sama. Selanjutnya Kebijakan relokasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dianggap kurang efektif oleh pemerintah Polandia dalam menangani krisis pengungsi. Dibuktikan dengan tidak mencapainya kuota yang ditentukan hingga menjelang akhir tahun 2015. Selain itu, adanya system QMV yang tidak mempresentasikan kepentingan negara anggota dalam merespon suatu keputusan sehingga memunculkan jurang yang dalam antara Uni Eropa

dan Negara Anggota karena perbedaan kepentingan dalam kasus krisis pengungsi ini.